

**PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI  
GURU MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN  
BERBASIS ZONASI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN  
BERPIKIR TINGKAT TINGGI (*HIGHER ORDER THINKING SKILLS/HOTS*)**

## **DATAR ISI**

<b>DATAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Permasalahan .....	1
B. Fenomena.....	2
C. Teori dan Jurnal .....	3
D. Data Lapangan .....	5
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>8</b>
A. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi .....	8
B. Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran .....	12
D. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran .....	13
E. Sasaran Program Diklat .....	14
F. Penyelenggara Program PKP .....	14
G. Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi/ Higher Order Thinking Skills .....	14
<b>BAB III</b> .....	<b>17</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>17</b>
A. Kesimpulan .....	17
B. Saran .....	18
<b>DAFTAR PUSTKA</b> .....	<b>19</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Permasalahan**

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Supriano, M.Ed, menyebutkan Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. selain itu peranan guru sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik. Guru harus selalu berupaya untuk menjaga keprofesionalannya dan selalu meng-update diri dengan melakukan berbagai keprofesionalan berkelanjutan.

Data dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di 34 provinsi di Indonesia, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud (Ditjen GTK) tahun 2015 menunjukkan rata-rata nasional hanya 44,5 jauh di bawah nilai standar 75. Bahkan kompetensi pedagogik dan profesional guru belum menunjukkan nilai yang menggembirakan yaitu rata-rata 53,05. Peringkat tertinggi di raih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai rata-rata 62,36 sedangkan Provinsi Maluku Utara menempati posisi paling bawah dengan skor 41,96. Hal ini membuktikan masih banyak guru yang cara mengajarnya kurang baik, cara mengajar di kelas membosankan, media pembelajaran yang digunakan kurang memadai dan lain sebagainya.

Langkah nyata dari Ditjen GTK untuk memperbaiki kompetensi guru adalah telah di laksanakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKP) untuk guru yang didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru. Program ini fokus utamanya adalah peningkatan kompetensi guru terutama dalam kompetensi pedagogi dan professional. Saat ini Ditjen GTK telah melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi dengan menfokuskan upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau dalam Bahasa Inggris nya *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*.

Tujuan pemerintah khususnya Ditjen GTK, terlaksananya program PKP ini adalah mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas peningkatan kompetensi pembelajaran, kegiatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu area wilayah dengan mempertimbangkan jarak, akses, dan volume guru yang ikut serta, memudahkan dalam melakukan pemetaan kompetensi kinerja serta aktivitas guru, memudahkan dalam melakukan pembinaan terhadap program peningkatan kompetensi guru sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan., memudahkan dalam melakukan supervisi dan koordinasi peningkatan kompetensi pembelajaran.

## **B. Fenomena**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI periode 2014-2019 Bapak Muhadjir Effendi menyebutkan bahwa guru tidak boleh berhenti untuk belajar karena anak didik kita yang sekarang keingintahuan semakin tinggi sekali. Pemerintah terus membuat kebijakan prioritas untuk menguatkan peran guru dan tenaga kependidikan. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) sepanjang 2015-2019 membuat kebijakan prioritas. Kebijakan tersebut meliputi perencanaan dan penataan kebutuhan guru, peningkatan kualifikasi akademik, penuntasan sertifikasi guru, peningkatan kompetensi berbasis kelompok kerja profesi, serta pemberian penghargaan, kesejahteraan, dan perlindungan.

Ditjen GTK- Kemdikbud Bapak Supriano menjelaskan peningkatan kompetensi guru juga didorong melalui sistem zonasi. Zonasi tidak hanya diterapkan untuk penerimaan peserta didik baru, tetapi juga pelatihan bagi guru. Kebijakan zonasi pendidikan yang diterapkan mulai 2017 juga diimplementasikan dalam pengembangan keprofesian bagi guru-guru, yakni melalui program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP). PKP menjadi langkah terobosan Ditjen GTK untuk melengkapi kegiatan pengembangan keprofesian guru di masa sebelumnya, yakni melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Guru

Pembelajar. PKP bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan bermuara pada peningkatan kualitas siswa.

### **C. Teori dan Jurnal**

1. Tibyan Ravaie, Aswandi Aswandi, M. Chiar, 2018. Penelitiannya berjudul *“The Development of Sustainable Profession (PKB) of Teachers in Senior High School”*. Penelitian ini menyebutkan sampai saat ini, Kabupaten Sambas pada jenjang sekolah menengah atas jarang ditemukan guru yang memiliki antusiasme untuk mengembangkan keprofesian berkelanjutan. PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 pasal 1 (2009: 4) dijelaskan bahwa pengembangan profesional berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Kegiatan ini melibatkan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. mayoritas guru juga kurang dilengkapi dengan keahlian seperti komputer untuk mengakses informasi tentang pengembangan diri yang lebih luas, ini tentu berkaitan erat dengan sarana dan prasarana sekolah di daerah yang masih minim. Sehingga pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa cenderung monoton dan kurang memotivasi kreativitas siswa dalam belajar. Faktor lain adalah kurangnya perhatian dari kepala sekolah untuk kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan tersebut. Pertukaran informasi tentang pendidikan di era modern saat ini diberikan oleh guru kepada siswa terbatas pada pengalaman guru. Secara umum, keberadaan pengembangan profesi berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Secara khusus, tujuan Pembangunan Berkelanjutan Profesi adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi di masa depan serta meningkatkan citra, martabat, dan profesi prestise guru di masyarakat.

2. Neila Ramdhani dkk, 2012. Penelitiannya berjudul “*Teacher Quality Improvement Program: Empowering Teachers to Increasing a Quality of Indonesian's Education*”. Hasil penelitian Peningkatan Mutu Guru/ *Teacher Quality Improvement (TQI)* program telah dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru untuk membuat iklim kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Program pelatihan terdiri dari tiga modul kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, dan pedagogi. Durasi adalah dua minggu, satu minggu untuk kepribadian dan sosial kompetensi, dan satu minggu untuk kompetensi pedagogi. Semua modul pelatihan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan soft skill guru untuk memungkinkan mereka untuk mengajar siswa secara efektif melalui penciptaan menyenangkan dan iklim yang inovatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak program TQI pada persepsi kepala sekolah, guru dan siswa terhadap cara guru menjalankan kelas sebelum dan sesudah mengikuti program ini. Ini adalah hipotesis bahwa program tersebut telah dipengaruhi secara positif persepsi guru tentang perubahan dalam cara mereka harus mengajar siswa mereka. Guru-guru memahami kompetensi mereka dalam mengajar meningkat secara signifikan setelah mengikuti program ini. Demikian pula, siswa juga melihat cara guru mereka mengajar mereka jauh lebih baik setelah guru mereka menerima pelatihan kompetensi melalui program ini. Sementara itu, persepsi kepala sekolah terhadap kompetensi guru tidak berbeda secara signifikan sebelum dan setelah berpartisipasi dalam program ini. Enam puluh tiga kepala sekolah sekolah, enam puluh tiga guru telah berpartisipasi dalam program TQI, dan 189 siswa responden penelitian ini. Sebuah kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi guru dan kepala sekolah, sedangkan data dari siswa dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dipandu dilakukan oleh asisten peneliti. Untuk tujuan analisis, data yang dikumpulkan dari tiga mahasiswa diringkas menjadi satu skor. Oleh karena

itu, ada 63 kepala sekolah sekolah, 63 guru dan 63 kelompok siswa. Data dianalisis dengan menggunakan dua arah analisis model campuran varians dengan pre-post untuk kelompok-kelompok serupa, dan tiga kelompok yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada efek interaksi signifikan. Guru mengevaluasi perilaku mereka sendiri jauh lebih dengan cara positif setelah bergabung dengan program TQI dibandingkan sebelum bergabung dengan program ( $p < 0,001$ ). Demikian pula, siswa mengevaluasi perilaku guru mereka jauh lebih tinggi setelah guru mereka bergabung dengan Program dibandingkan dengan evaluasi sebelum bergabung dengan pelatihan ( $p < 0,001$ ). Berbeda dengan persepsi guru dan siswa, kepala sekolah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara persepsi pelatihan pra dan pasca ( $p = 0.99$ ).

3. Thamrin dkk, 2019. Penelitiannya yang berjudul “*Conceptual Variations On Reading Comprehension Through Higher Order Thinking Skills (Hots) Strategy*”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Ada dua jenis utama dari variasi konseptual dalam membaca pemahaman melalui strategi HOTS di kelas membaca kritis yang melibatkan langkah-langkah strategi HOTS (mengingat, pemahaman, penerapan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan) dan kritis membaca (memprediksi, meringkas, menghasilkan pertanyaan dan mengklarifikasi ). Para siswa cenderung mulai melibatkan pengetahuan sebelumnya mereka, pengalaman, dan alasan logis setelah mereka tahu tentang langkah-langkah membaca kritis dan strategi HOTS disampaikan oleh dosen selama kegiatan kelas.

#### **D. Data Lapangan**

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi tantangan dalam era revolusi industri 4.0. pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peranan guru yang professional dalam

menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Sementara "rapor" guru Indonesia dalam Uji Kompetensi Guru (UKG) sejak 2015 hingga 2017 rata-ratanya masih di bawah 70 dari nilai maksimal 100. UKG dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan menjadi bagian dari sertifikasi kemampuan guru. Selain sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu, pemegang sertifikasi juga dijanjikan tunjangan. Pelaksanaan UKG berfokus pada identifikasi kemampuan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. Kompetensi pedagogik, pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Guru harus mampu memenuhi Standar Kompetensi Minimal dengan angka maksimal 100. Bila tak lulus, guru yang bersangkutan bisa ikut ujian lagi sembari mengikuti berbagai program peningkatan kapasitas.

Berikut ini adalah rerata nilai hasil uji kompetensi guru secara nasional yang diambil dari data hasil UKG Ditjen GTK Kemdikbud :

<b>Jenjang</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>TK</b>	43,74	65,82	68,23
<b>SD</b>	40,14	63,80	62,22
<b>SMP</b>	44,16	65,33	67,76
<b>SMA</b>	45,38	66,66	69,55

Dari data diatas dapat dilihat rerata nilai UKG di tahun 2015, 2016, 2017 nilai yang paling tinggi adalah guru di jenjang SMA dengan nilai rata-rata 69,55. Capaian tiga tahun terakhir sejak 2015 dalam catatan Kemendikbud, peningkatan nilai secara signifikan terjadi pada 2016. Namun angka rata-ratanya hingga 2017 masih di bawah 70, untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tahun ajaran 2018/2019 Kemdikbud menargetkan nilai UKG rata-rata di angka tujuh (puluh) koma sekian.



Langkah nyata Kemdikbud dari rendahnya nilai rerata UKG secara nasional yang masih berada dibawah batas minimal yaitu dengan skor 70, maka pemerintah melaksanakan program keprofesian berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi**

##### **1. Pengertian**

Ravaie (2018:347) menjelaskan pengembangan profesional berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) merupakan tujuan dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), selanjutnya akan disingkat dengan Program PKP.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesiannya. Program PKB yang dikembangkan oleh Ditjen GTK sebelumnya, didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru. Program ini berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional. Sedangkan Program PKP lebih berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penyelenggaraan Program PKP didesain dengan grand desain seperti berikut :



Sumber : buku pedoman program PKP melalui peningkatan kompetensi pebelajaran berbasis zonasi, Ditjen GTK-Kemdikbud tahun 2019.

## 2. Kegiatan

Pelaksanaan Program PKP dirancang dalam bentuk pelatihan berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Guru Inti yang masing-masing memiliki pola 60 Jam Pelajaran (JP), dan Pelatihan Guru Sasaran dengan pola 82 JP (dengan pola In-On-In).

## B. Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

### 1. Pengertian

Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) pada hakikatnya merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan (Integrasi Pembangunan), melalui pengelolaan Pusat Kerja Guru (PKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan

Konseling (MGBK), dan Musyawarah Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (MGTIK) yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon. Zona PKP terintegrasi secara vertikal dari Satuan Pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, sampai Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

## **2. Tujuan**

Sejalan dengan pengertian di atas, Zona PKP bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program PKP, dimana kegiatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu area wilayah dengan pertimbangan jarak, akses, dan volume guru yang ikut serta
- c. Memudahkan dalam melakukan pemetaan kompetensi, kinerja dan aktivitas guru
- d. Memudahkan dalam melakukan pembinaan terhadap Program PKP sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan.
- e. Memudahkan dalam melakukan supervisi dan koordinasi Program PKP.

## **3. Mekanisme Penetapan Zona PKP**

- a. Penetapan Zona PKP dilakukan dengan mempertimbangkan rambu-rambu berikut: Penetapan zona didasarkan pada pengklasifikasian setiap jenjang satuan pendidikan.
- b. Penentuan Pusat Belajar (PB) pada zona sebagai tempat pelaksanaan Program PKP didasarkan pada data yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau dapat menggunakan nominasi titik pusat zona yang sudah ada pada laman Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan

Kebudayaan (<http://zonasi.data.kemdikbud.go.id>) yang telah mempertimbangkan indikator skala nasional yaitu Akreditasi Sekolah, serta indikator kontrol yang mencakup hasil Ujian Nasional (UN), Uji Kompetensi Guru (UKG), dan Hasil Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP), sarana dan prasarana, serta faktor pendukung proses belajar mengajar. Pada tahap ini, pertimbangan terhadap dukungan sarana dan prasarana dan dukungan peningkatan kompetensi guru menjadi pertimbangan utama.

- c. Perancangan Program PKP di zona yang telah ditetapkan harus mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan, jarak, akses, jumlah, dan sebaran guru.
- d. Pemantauan terhadap Zona PKP melalui pemberdayaan PKG/KKG/MGMP/MGBK/MGTIK melibatkan LPMP yang ada di zona tersebut.

#### **4. Pengelolaan Zona PKP**

Pengelolaan Zona PKP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penentuan zona prioritas pelaksanaan Program PKP dilakukan berdasarkan analisis terhadap: 1) nilai US/UN/USBN pada tiga tahun terakhir dan/atau 2) nilai Uji Kompetensi Keahlian Peserta Didik bagi bidang kejuruan. 3) nilai UKG bagi bidang Bimbingan Konseling, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Luar Biasa,
- b. Menetapkan rombongan belajar (rombel) Program PKP berdasarkan radius terdekat dengan Pusat Belajar, yaitu sekolah yang akan dijadikan tempat kegiatan Program PKP yang berada di zona yang telah ditentukan. Khusus untuk mapel yang jumlah gurunya sedikit (SMA, SMK, SLB) maka

dimungkinkan untuk membuat rombel yang anggotanya berasal dari beberapa zona.

- c. Melakukan analisis jumlah guru sesuai bidang tugas yang diampu di masing-masing zona rombel.
- d. Menetapkan PKG, KKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK berdasarkan jumlah keanggotaan pada rentang 10-20 orang per kelompok.
- e. Melakukan analisis kebutuhan guru inti untuk masing-masing zona.
- f. Melakukan analisis kebutuhan dan waktu pelaksanaan pembekalan guru inti oleh masing-masing UPT sesuai jumlah guru inti di masing-masing zona.

### **C. Tujuan dan Manfaat Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran**

Ramdhani (2012:1) menjelaskan hasil penelitian Peningkatan Mutu Guru/Teacher Quality Improvement (TQI) program telah dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru untuk membuat iklim kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Tujuan Program PKP adalah meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).

Manfaat Program PKP adalah sebagai berikut:

1. Membiasakan guru untuk membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaiannya;
2. Membiasakan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi sehingga dapat meningkatkan kompetensinya;

3. Memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik;

#### **D. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran**

1. Taat Azas, program PKP dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota.
2. Berbasis kompetensi, merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada standar isi, kompetensi inti dan kompetensi dasar, standar proses, dan standar penilaian pada Kurikulum 2013.
3. Terstandar pengelolaan, harus memenuhi standar yang ditetapkan meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penyelenggaraan, standar waktu pelaksanaan, dan standar sertifikat.
4. Profesional, hasil analisa kesulitan peserta didik dalam mengikuti UN dan USBN menjadi dasar untuk Program PKP sesuai dengan jenjang satuan pendidikan. Selain itu, hasil UKG guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK dan hasil UKK guru kejuruan digunakan dalam analisis kebutuhan peningkatan kompetensi di masing-masing PKG, KKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK.
5. Transparan, proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.
6. Akuntabel, Proses dan hasil Program dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan

akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak.

7. Berkeadilan Semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program PKP. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program PKP serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

#### **E. Sasaran Program Diklat**

Sasaran Program PKP adalah guru pada semua jenjang satuan pendidikan mulai dari TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB.

#### **F. Penyelenggara Program PKP**

Program PKP merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melibatkan UPT yaitu Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, masyarakat penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru serta komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang terdiri dari Gugus, KKG, MGMP, MGBK, MGTIK.

#### **G. Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi/ Higher Order Thinking Skills**

Guru yang telah mampu membuat soal untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi akan lebih mudah dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam hal mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Guru dalam melakukan pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi harus memahami bagaimana menyusun soal hots. Butir soal kemampuan berpikir tingkat tinggi harus



memperhatikan beberapa hal. Guru harus memahami tingkatan mana yang akan diukur dengan menggunakan kata kunci yang tepat.

Taksonomi Bloom tujuan kognitif dengan mengelompokkan ke dalam enam tahap, mulai dari C1 ke C6 yaitu memahami (C1), menerapkan (C2), menganalisis (C3), mengevaluasi (C4) dan membuat/mencipta (C6). Fase C1 ke C3 memiliki turunan kecakapan berpikir, sementara sisanya, C4 untuk C6 adalah HOTS. Singkatnya, tujuan utama HOTS adalah bahwa siswa dapat mengumpulkan informasi, mengkategorikan, dan menghasilkan ide-ide baru yang akan diterapkan di setiap situasi lain yang mereka miliki, di luar kelas atau acara-acara lainnya.

Menurut Thamrin, (2019:99) Siswa cenderung mulai melibatkan pengetahuan sebelumnya, pengalaman, dan alasan logis setelah mereka tahu tentang langkah-langkah membaca kritis dan strategi HOTS disampaikan oleh dosen/guru selama kegiatan kelas.

Sejak tahun 2016 soal HOTS dalam ujian nasional sudah diberlakukan Kemdikbud telah memberlakukan soal yang membutuhkan daya nalar tingkat tinggi atau High Order Thinking Skills (HOTS). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas Ujian Nasional dan mengetahui kemampuan siswa. Berikut ini data rata-rata nilai ujian nasional tahun 2018-2019 sumber data dari Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud :

<b>Jenjang</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>SMP</b>	51,84	52,82
<b>SMA (Bahasa)</b>	50,74	51,63
<b>SMA (IPA)</b>	51,76	53,00

<b>SMA (IPS)</b>	46,31	47,42
<b>SMK</b>	45,21	46,72

Hasil nilai rata-rata ujian nasional tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Oleh karena itu peserta didik harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.

Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas peserta didik adalah menyelenggarakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Program PKP merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan dalam hal ini peserta didik. Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kemendikbud yang menekankan pembelajaran berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS). Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik. Dalam upaya menjaga keprofesionalannya, guru senantiasa harus meng-update diri dengan melakukan berbagai pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Ditjen GTK didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru, lebih memfokuskan pada peningkatan kompetensi guru terutama dalam kompetensi pedagogi dan profesional, Program PKP ini lebih memfokuskan pada upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Program PKP ini adalah mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas peningkatan kompetensi pembelajaran, kegiatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu area wilayah dengan mempertimbangkan jarak, akses, dan volume guru yang ikut serta, memudahkan dalam melakukan pemetaan kompetensi kinerja serta aktivitas guru, memudahkan dalam melakukan pembinaan terhadap program peningkatan kompetensi guru sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan., memudahkan dalam melakukan supervisi dan koordinasi peningkatan kompetensi pembelajaran. Pembiasaan berfikir tingkat tinggi (HOTS) di harapkan membuat siswa menjadi terbiasa dan mampu memecahkan permasalahan dalam soal dan dapat mencapai nilai Ujian Nasional yang memuaskan.

**B. Saran**

Seluruh guru di Indonesia harus memiliki kesadaran dalam dirinya sendiri untuk selalu meng-update pengetahuannya secara berkelanjutan dalam menyongsong era globalisasi, dimana saat ini telah memasuki era revolusi industry 4.0. Sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam era globalisasi yang semakin maju. Peran pemerintah pusat maupun daerah senantiasa melakukan pengawasan, pembinaan, evaluasi, penyediaan dana, sehingga program peningkatan keprofesian bagi guru melalui peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi benar-benar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang pendidikan.

## DAFTAR PUSTKA

- Buku Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- Beritaagar.id. (2018, 27 November). *Rapor Guru dalam Hasil Uji Kompetensi Guru*.halaman 4.
- Diputera Mahindra Artha. (2019). *Kemampuan Tingkat Tinggi (HOTS)*. Journal Reseapedia Vol 1 (1) 2019.
- Laporan Hasil Ujian Nasional. Diperoleh 26 Oktober 2019 dari [https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/#2018-2019!smp!capaian\\_nasional](https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/#2018-2019!smp!capaian_nasional).
- Ramdhani Neila, Ancok b Djamaludin, Swasono Yuliardi, Suryanto Peno. (2012). *Teacher Quality Improvement Program: Empowering teachers to increasing a quality of Indonesian's education*. International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012).
- Ravaie Tibyan, Aswandi, M.Chiar. (2018). *The Development of Sustainable Profession (PKB) of Teachers in Senior High School*. Journal of Education, Teaching and Learning Volume 3 Number 2 September 2018. Page 347-353 p-ISSN: 2477-5924 e-ISSN: 2477-8478.
- Thamrin Nani Ronsani, Agustin Silvia. (2019). *Conceptual Variations On Reading Comprehension Through Higher Order Thinking Skills (Hots) Strategy*. Journal of English Education Volume 7, Issue 2, June 2019.